

# **RENCANA KERJA BPSDMD TAHUN 2024**



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

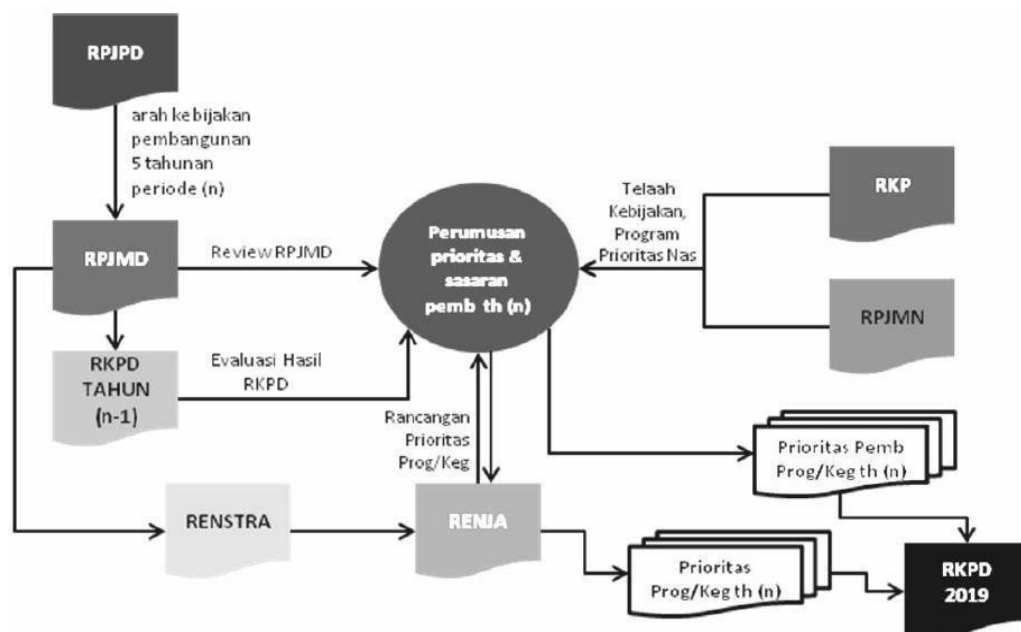
### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pengembangan sumberdaya masyarakat dalam artian pengembangan kompetensi pada dasarnya merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan daerah. Dengan kata lain, pengembangan sumberdaya manusia merupakan komponen pengungkit bagi pembangunan, sedangkan visi, misi dan program strategis pembangunan merupakan orientasi dari pengembangan sumber daya manusia. Dalam tataran teoritis maupun praktis, telah terbukti bahwa pengembangan kompetensi yang efisien dan efektif merupakan faktor penentu untuk meningkatkan daya saing suatu daerah.

Layaknya pembangunan pada sektor-sektor lainnya, pembangunan sumber daya manusia juga tidak lepas dari kondisi lingkungan strategis yang semakin dinamis, penuh ketidakpastian, kompleks, dan ambigu (*volatile, uncertain, complex, ambiguous/VUCA*). Hal ini tidak lepas dari faktor pendorong yang bersifat global atau yang dikenal sebagai fenomena yang telah berkembang dan memiliki dampak yang berskala luas, saling terkait, mendalam, dan mampu mengubah pola hidup individu, organisasi, dan masyarakat hingga beberapa tahun ke depan. Pj. Gubernur Jawa Tengah menjabarkan adanya 10 (sepuluh) program prioritas yang harus diperhatikan dan digarap yaitu Mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 serentak secara luber dan jurdil, Menjaga stabilitas (sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat), Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan angka pengangguran dan stunting, Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi dan karhutla), Peningkatan kualitas sistem pendidikan vokasi, Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif, Pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi, Pengembangan layanan publik dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Meningkatkan pengawasan internal aparatur sipil negara. Kesepuluh program prioritas ini turut membentuk arah pembangunan daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional.

Guna mendukung dan merespon program strategis tersebut Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah BPSDMD yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta telah selaras dengan ruang lingkup Prioritas Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

Renja perangkat daerah juga harus selaras dengan program kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP berpedoman pada RPJMN maupun kebijakan daerah yang tercantum dalam RKPD berpedoman pada RPD. Secara ringkas alur perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ditunjukkan pada Gambar.



Kondisi lingkungan strategis telah berubah menyesuaikan pola kebiasaan baru pasca pandemi. Pada kondisi sosial dan ekonomi yang terdampak, perlu penyesuaian arah kebijakan, strategi, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, sejalan dengan Visi Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) yaitu Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dan Misi LAN RI yaitu Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

## 1.2 LANDASAN HUKUM.

Landasan hukum dalam penyusunan Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4355);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Th 2004 No 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
- u. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.**

Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di samping sebagai dokumen perencanaan program tahunan yang memberikan arah kebijakan serta pelaksanaan program BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan peningkatan kompetensi aparatur yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Tengah juga melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 serta Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Adapun tujuan Penyusunan Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja dengan memperhatikan penyesuaian prioritas dan fokus pembangunan dengan kebijakan baru dalam pencapaian target yang optimal serta perumusan kembali arah kebijakan, strategi dengan program pembangunan dalam Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara renstra dengan renja.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 mengacu ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu terdiri dari :

##### **Bab I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **Bab II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

##### **Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024
- 4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

##### **Bab V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022**

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD

Indikator kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun mengacu pada tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditentukan dalam Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu urusan kepegawaian dan diklat, dengan 2 Program dan 11 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

##### 1) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Pengembangan Kompetensi Teknis
- Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

##### 2) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berikut capaian kinerja Program/Kegiatan pada Tahun 2022 diantaranya :

1. Realisasi program pengembangan sumber daya manusia yang telah memenuhi target kinerja diantaranya pelatihan latsar CPNS, pelatihan pengembangan kompetensi teknis, pelatihan pengembangan kompetensi fungsional, dan pelatihan pengembangan kompetensi manajerial dari target 100% telah terpenuhi capaian 100% sesuai dengan rencana.
2. Realisasi program pengembangan sumber daya manusia yang melebihi dari target kinerja diantaranya perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti dari target 79% terpenuhi sebesar 89,23%, pencapaian kegiatan indeks penjaminan mutu dari target 3,5 terpenuhi mencapai 3,63 dan

pencapaian PNS yang lulus uji kompetensi dari target 80% tercapai 97,30%.

Faktor - faktor penyebab target kinerja program tercapai melebihi target dikarenakan adanya :

- kolaborasi dengan instansi pusat terkait dengan penyelenggaraan akreditasi lembaga dan pelatihan sehingga indeks capaian mutu bisa melebihi target;
- rencana pelatihan yang di proses melalui sistem penjangingan kebutuhan pengembangan kompetensi digunakan sebagai dasar penentuan pelatihan sehingga hal ini membuat perencanaan yang ditindaklanjuti bisa melebihi target; dan
- jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi melebihi target dan tingkat kelulusannya juga mengikuti lebih dari target.

Dari data di atas capaian tahun 2022 pada level program masih perlu mendapat dukungan untuk meningkatkan kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah agar seluruh indikator program dapat melebihi seluruh targetnya.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 lebih detail dapat diketahui dalam Tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1.**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPSDMD dan Pencapaian Renstra BPSDMD s/d Tahun 2023  
Provinsi Jawa Tengah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Kepegawaian dan Diklat									
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%
	Sub Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	1	1	100%	1	1	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah yang disusun	Laporan	1	1	1	100%	1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SKPD									
	Sub Kegiatan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%
	<b>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Laporan	1	1	1	100%	1	1	100%
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	1	0	0	0	0	0	0
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	1	1	100%	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	40	60	60	100%	27	87	100%
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	100%	1	1	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	100%	1	1	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1	1	100%	1	1	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	100%	1	1	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	1	100%	1	1	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bulan	12	1	1	100%	1	1	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	12	12	100%	12	12	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	6	4	4	100%	4	4	100%
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	69	84	115	100%	9	9	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	1	1	100%	1	1	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	22	6	27	100%	19	19	100%
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	12	100%	12	12	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	10	10	100%	10	10	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	21	21	21	100%	21	21	100%
	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)</b>	Angka	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>100%</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan	Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Angka	45	60	60	100%	22	22	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	50	28	28	100%	12	12	100%
	<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	12	5	5	100%	5	5	100%
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan	Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	18	32	114	356,25%	16	16	100%
		Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%
		Jumlah pelatihan yang diakreditasi	Jenis	1	1	1	100%	2	2	100%
		Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Angka	28	122	198	162,30%	115	115	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Prajabatan									
	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>Prosentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional</b>	<b>Orang</b>	<b>1.000</b>	<b>10.610</b>	<b>16.870</b>	<b>159%</b>	<b>1.620</b>	<b>3.020</b>	<b>186,42%</b>
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	Orang	350	9.485	14.673	154,70%	820	2.220	270,73%
		Jumlah peserta pelatihan penjurusan jabatan fungsional	Orang	300	490	517	105,51%	340	340	100%
		Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	Orang	350	635	1.680	264,57%	460	460	100%
	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>Prosentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Manajerial</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial</b>	<b>Orang</b>	<b>2.640</b>	<b>4.127</b>	<b>13.044</b>	<b>316,06%</b>	<b>2.394</b>	<b>29.645</b>	<b>1.238,30%</b>
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,	Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	Orang	400	3.434	3.434	100%	1.384	1.708	123,41%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Orang	240	135	135	100%	240	240	100%
		Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	Orang	200	135	135	100%	240	240	100%
		Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	Orang	120	120	120	100%	180	180	100%
		Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	Orang	1.800	303	9.220	3.042,90%	350	27.277	7.793,42%
	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>Prosentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Orang</b>	<b>2.400</b>	<b>1.495</b>	<b>2.045</b>	<b>136,78%</b>	<b>2.650</b>	<b>3.939</b>	<b>148,64%</b>
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	Orang	750	490	694	141,63%	830	1.849	222,77%
		Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	Orang	750	392	719	183,41%	740	890	120,27%
		Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	Orang	900	613	632	103,09%	1.080	1200	111,11%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>Prosentase Perencanaan Bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan</b>	%	100	100	100	100%	100	100	100%
	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	Dokumen	3	3	3	100%	3	3	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan analisis pengembangan kompetensi	Dokumen	2	36	36	100%	36	36	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	18	30	58	193,33	30	30	100%
	<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi</b>	Dokumen	3	3	3	100%	3	3	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1	1	2	200%	1	1	100%
		Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	Dokumen	2	36	36	100%	36	36	100%
		Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	24	5	7	140%	20	20	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%
	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>Prosentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan	Jumlah identifikasi kebutuhan skema sertifikasi	Dokumen	1	2	5	250%	5	5	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dalam Negeri Provinsi	Jumlah kualifikasi asesor kompetensi yang dimiliki	Orang	2	3	8	266,67%	5	5	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	Orang	350	674	674	100%	150	372	248%

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah menjalankan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Diklat, sebagaimana diatur dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan : Urusan Kepegawaian dan Diklat.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menjalankan 1 program utama yang menjadi bagian dari program-program prioritas pembangunan sesuai tugas dan fungsinya, yaitu :

### 1) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam upayanya bahwa meningkatkan kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah merupakan tugas tanggung jawab bersama maka Corporate University menjadi pilihan. Pengertian Jateng Corporate University yaitu Model dan strategi pengembangan kompetensi secara terintegrasi selaras dengan kebutuhan organisasi. Pemahaman tersebut mengandung maksud bahwa untuk mengembangkan kompetensi inti semua ASN di Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara gayeng dengan mengintegrasikan serta melibatkan kementerian, lembaga, instansi, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mitra utama pengembangan kompetensi.

Adapun Capaian masing-masing indikator program-program prioritas sebagaimana penjelasan berikut :

- Persentase kelulusan Program pengembangan kompetensi ASN, Teknis, Fungsional, Manajerial dan Latsar CPNS mencapai 100%.
- Prosentase Kelulusan Sertifikasi Kompetensi 91,01%.
- Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti untuk Renja 2022 sebesar 92,30% dan Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan sebesar 3,51%.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPSDMD  
Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun	Realisasi Capaian Tahun	Proyeksi Capaian Tahun	Proyeksi Capaian Tahun	Catatan Analisis
				2022	2023	2022	2023	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>									
1	Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti			79	82	92,30	82	82	100	Diganti satuan menjadi persentase bukan lagi angka



### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dengan kedudukan dan fungsinya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu urusan kepegawaian dan diklat. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka urusan yang diampu menjadi prioritas adalah tentang Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi. Hal ini sejalan juga dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dimana dalam pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih ada beberapa permasalahan dan hambatan yang perlu dihadapi diantaranya :

- 1) Disruption Era (VUCA) terkait kondisi ketidakpastian dalam pemenuhan hak pegawai;
- 2) Urgensi Peran Strategic Partnership dalam pengembangan kompetensi;
- 3) Transformasi Teknologi Bangkom;
- 4) SDM ASN yang BerAKHLAK mewujudkan SMART ASN;
- 5) Kebijakan anggaran pengembangan kompetensi 0,34% APBD Provinsi;
- 6) Dinamika kebijakan pemerintah pusat, antara lain : Penurunan Stunting, Penghapusan kemiskinan ekstrem, Pengendalian inflasi daerah, Implementasi satu data Indonesia, Implementasi Desa Anti Korupsi.

### 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada berikut berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				<b>47.233.724.000</b>	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				<b>47.233.724.000</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang			<b>325.000.000</b>	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang			<b>325.000.000</b>
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	135.000.000				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	135.000.000
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	21 laporan	190.000.000				Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	21 laporan	190.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semarang			<b>32.253.755.000</b>	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semarang			<b>32.253.755.000</b>
			Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	29.235.266.000				Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	29.235.266.000
			Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	2.798.479.000				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	2.798.479.000
			Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	1 dokumen	56.863.000				Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	1 dokumen	56.863.000
			Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat desa	1 laporan	78.868.000				Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat desa	1 laporan	78.868.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
			Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah yang disusun	1 laporan	53.194.000				Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah yang disusun	1 laporan	53.194.000
			Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	31.085.000				Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	31.085.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semarang			<b>234.000.000</b>	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semarang			<b>234.000.000</b>
			Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 dokumen	234.000.000				Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 dokumen	234.000.000
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Semarang			<b>79.990.000</b>	4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Semarang			<b>79.990.000</b>
			Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	1 dokumen	79.990.000				Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	1 dokumen	79.990.000
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semarang			<b>230.400.000</b>	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semarang			<b>230.400.000</b>
			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	0				Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	0
			Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	10 dokumen	49.000.000				Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	10 dokumen	49.000.000
			Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 orang	181.400.000				Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 orang	181.400.000
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semarang			<b>1.996.289.000</b>	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semarang			<b>1.996.289.000</b>

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
			Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	173.093.000				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	173.093.000
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	188.196.000				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	188.196.000
			Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	374.165.000				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	374.165.000
			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	305.060.000				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	305.060.000
			Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1 paket	76.200.000				Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1 paket	76.200.000
			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	36.000.000				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	36.000.000
			Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	100.000.000				Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	100.000.000
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 bulan	275.070.000				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 bulan	275.070.000
			Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	12 bulan	8.505.000				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	12 bulan	8.505.000
			Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	6 dokumen	460.000.000				Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	6 dokumen	460.000.000
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semarang			<b>723.000.000</b>	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semarang			<b>723.000.000</b>

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
			Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	106 unit	588.000.000				Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	106 unit	588.000.000
			Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	1 unit	15.000.000				Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	1 unit	15.000.000
			Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	53 unit	120.000.000				Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	53 unit	120.000.000
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang			<b>9.647.440.000</b>	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang			<b>9.647.440.000</b>
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	4.800.000				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	4.800.000
			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	2.428.890.000				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	2.428.890.000
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	7.213.750.000				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	7.213.750.000
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Semarang			<b>1.743.850.000</b>	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Semarang			<b>1.743.850.000</b>
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 bulan	149.600.000				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 bulan	149.600.000
			Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	12 bulan	30.000.000				Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	12 bulan	30.000.000
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 bulan	1.000.000.000				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 bulan	1.000.000.000
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 bulan	564.250.000				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 bulan	564.250.000
II	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				<b>19.589.676.000</b>	II	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				<b>19.589.676.000</b>

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Semarang			<b>1.484.329.000</b>	1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Semarang			<b>1.484.329.000</b>
			Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	1 dokumen	4.844.000				Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	1 dokumen	4.844.000
			Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	40 dokumen	4.327.000				Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	40 dokumen	4.327.000
			Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	60 angka	20.555.000				Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	60 angka	20.555.000
			Jumlah metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan	1 dokumen	1.500.000				Jumlah metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan	1 dokumen	1.500.000
			Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan analisi pengembangan kompetensi	2 dokumen	41.333.000				Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan analisi pengembangan kompetensi	2 dokumen	41.333.000
			Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	25 dokumen	146.770.000				Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	25 dokumen	146.770.000
			Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	920	429.818.000				Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	920	429.818.000
			Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	850	423.000.000				Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	850	423.000.000
			Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	1140	412.182.000				Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	1140	412.182.000
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi	Semarang			<b>18.105.347.000</b>	2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi	Semarang			<b>18.105.347.000</b>
			Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	10 dokumen	59.550.000				Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	10 dokumen	59.550.000
			Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	13 dokumen	41.631.000				Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	13 dokumen	41.631.000
			Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	1 dokumen	38.739.000				Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	1 dokumen	38.739.000
			Jumlah pelatihan yang diakreditasi	1 jenis	95.307.000				Jumlah pelatihan yang diakreditasi	1 jenis	95.307.000
			Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	24 angka	62.548.000				Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	24 angka	62.548.000
			Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	430 orang	474.584.000				Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	430 orang	474.584.000
			Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	390 orang	503.159.000				Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	390 orang	503.159.000
			Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	400 orang	372.257.000				Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	400 orang	372.257.000
			Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	60 orang	199.700.000				Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	60 orang	199.700.000
			Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	200 orang	2.530.248.000				Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	200 orang	2.530.248.000
			Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	230 orang	2.292.580.000				Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	230 orang	2.292.580.000
			Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	120 orang	2.104.945.000				Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	120 orang	2.104.945.000

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
			Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	1745 orang	8.799.047.000				Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat	1745 orang	8.799.047.000
			Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang	1 dokumen	1.500.000				Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang	1 dokumen	1.500.000
			Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	2 dokumen	20.049.000				Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	2 dokumen	20.049.000
			Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan	24 dokumen	48.998.000				Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan	24 dokumen	48.998.000
			Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang	1 dokumen	4.149.000				Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang	1 dokumen	4.149.000
			Jumlah identifikasi kebutuhan skema sertifikasi	1 dokumen	15.570.000				Jumlah identifikasi kebutuhan skema sertifikasi	1 dokumen	15.570.000
			Jumlah kualifikasi asesor kompetensi yang dimiliki	2 orang	22.085.000				Jumlah kualifikasi asesor kompetensi yang dimiliki	2 orang	22.085.000
			Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	300 orang	418.701.000				Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	300 orang	418.701.000
<b>TOTAL</b>					<b>66,823,400,000</b>	<b>TOTAL</b>					<b>66,823,400,000</b>

Dalam Tabel 2.4 diatas dapat digambarkan bahwa kebutuhan yang diajukan dalam Renja 2024 sebesar Rp.66,823,400,000,00 digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara *e-learning/blended learning* sehingga membutuhkan penguatan dalam sarana dan prasarana penunjang pelatihan.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, tidak ada program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, maupun perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL	-	-	-	-

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Birokrasi tidak akan terlepas dari perkembangan zaman dimana harus memiliki visi yang besar, bersifat jangka panjang dan adaptif terhadap perubahan permasalahan pembangunan. Hal ini harus diantisipasi agar tidak menimbulkan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, beberapa identifikasi permasalahan / tantangan yang muncul di BPSDMD antara lain :

- Belum optimalnya penyiapan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi;
- Belum optimalnya perencanaan pengembangan kompetensi ASN berdasarkan AKPK;
- Belum optimalnya perangkat pembelajaran sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi.

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mempunyai beberapa strategi menjawab tantangan guna mendukung pencapaian Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005 -2025 **“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”** dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain :

- Optimalisasi hasil identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi sebagai dasar perencanaan pengembangan kapasitas ASN;
- Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis kompetensi yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran Modern;
- Optimalisasi pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam berbagai model / jenis pelatihan;
- Pengembangan kompetensi SDM Aparatur yang konsisten dan Berkesinambungan;
- Peningkatan manajemen SDM pengembang kompetensi guna mewujudkan pelayanan publik yang prima (*excellence public services*) serta mewujudkan kapasitas SDM yang berdaya saing global;

- Pelaksanaan pengembangan sarana prasarana sesuai *master plan* dalam rangka menjamin mutu pelayanan publik serta mewujudkan lembaga pelatihan yang kompetitif;
- Memaksimalkan anggaran yang ada dalam pengembangan sistem AKPK dan perlunya standart kompetensi sebagai dasar analisa kebutuhan pengembangan kompetensi ASN.

Visi pembangunan nasional seperti dirumuskan dalam GBHN adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, yang didukung manusia Indonesia yang memiliki karakteristik :

a. Berakhlak mulia;

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai - nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

b. Berkesadaran Hukum;

Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infra struktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

c. Cinta Tanah Air;

Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

d. Berwawasan Global;

Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara dengan demikian visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada Tahun 2025.

### 3.2. Program dan Kegiatan

Proses perencanaan kegiatan yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan memperhatikan hasil analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*) sebagai berikut :

a. **Strength;**

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai *problem solving* dalam pembangunan memiliki reputasi yang baik dalam pengembangan kompetensi dengan pendidikan dan pelatihan :

- Tersertifikasi ISO 9001:2015, bukti terhadap pemeliharaan standar

mutu pelayanan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi, dimana pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

- Predikat Lembaga Pelatihan Pemerintah Terbaik dalam kategori Lembaga Pemerintah Daerah penyelenggaraan pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS (4 kali sebagai terbaik pertama).
- BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga memiliki fasilitas yang memadai sebagai penunjang dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi berbasis *corporate university* seperti yang diterapkan di era sekarang.
- Hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan kategori A pada tahun 2023 sebesar 84,30 dari tahun sebelumnya sebesar 83,30, hal ini menjadi indikator BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

**b. Weakness;**

Kurangnya pemanfaatan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi sebagai faktor rendahnya rata-rata pegawai mendapatkan pengembangan kompetensi; rendahnya rata-rata pegawai terkait dengan pengiriman peserta pelatihan oleh *stakeholders* yang seringkali mengirimkan peserta yang sama untuk beberapa pelatihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan teknis perangkat daerah.

**c. Opportunity;**

- BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan mendukung melakukan pembenahan secara besar besaran menjadikan Jateng *Corporate University* dengan proses yang terintegrasi, metode pembelajaran yang menarik, output dan *outcome* jelas dalam menyiapkan ASN yang mempunyai integritas, mampu melayani masyarakat secara mudah, murah, dan cepat.
- Sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah adalah lingkup kewenangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Provinsi Jawa Tengah yang telah dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi untuk seluruh jabatan fungsional.

**d. Threat;**

- Penyelenggaran bangkom aparatur belum sepenuhnya berbasis

kompetensi dan rendahnya rata - rata pegawai mendapatkan bangkom, sehingga tidak adanya kesesuaian perencanaan pengembangan kompetensi dengan perencanaan penganggaran dari tiap *stakeholders*.

- Kurang optimalnya penjaminan mutu dalam pelatihan, karena seluruh program pelatihan teknis dan fungsional belum terakreditasi hingga dalam evaluasi pasca diklat belum dilakukan sampai kepada evaluasi dampak yang mendalam.
- Pergeseran dan shift paradigma dari training ke learning yang bisa menjadi kendala dalam pengembangan kompetensi dalam beberapa kurikulum dan modul yang tidak sesuai dengan kondisi terkini.

### 3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja OPD)

Mengacu pada Rencana Awal RKPD Tahun 2024 dan mendukung tujuan dari Pj Gubernur Jawa Tengah dengan 10 program prioritasnya maka tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024 adalah :

#### a. Tujuan

Selaras dengan tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024-2026 yang **semakin sejahtera dan lestari**, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan Kompetensi ASN.

Tujuan tersebut terukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi untuk mengukur kualitas pelayanan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah dan dengan Indeks Kompetensi ASN untuk mengukur Peningkatan Kompetensi ASN.

#### b. Sasaran

Salah satu sasaran yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024-2026 adalah **terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis**, maka sasaran yang ingin dicapai oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah dengan indikator Indeks Manajemen Resiko;

3. Terpenuhinya Hak Pengembangan Kompetensi ASN dengan indikator presentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya melalui Pengembangan Kompetensi;
4. Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi ASN dengan indikator prosentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi.

Tujuan dan sasaran ini kemudian ditetapkan target atau proyeksi untuk menjadi panduan dalam menyusun perencanaan tahunan serta untuk menjadi instrumen evaluasi kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2024-2026. Penetapan target atau proyeksi per indikator tujuan dan sasaran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Tujuan dan Sasaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024	
				Target	Rp
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH</b>					<b>47.233.724.000</b>
		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	72	
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah</b>				<b>46.908.724.000</b>
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	46.908.724.000
	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah</b>				<b>325.000.000</b>
		Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	325.000.000
<b>MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN</b>					<b>19.589.676.000</b>
		Indeks Kompetensi ASN	Angka	3,07	
	<b>Terpenuhinya Hak Pengembangan Kompetensi ASN</b>				<b>19.133.320.000</b>
		Presentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya melalui Pengembangan Kompetensi	%	8,67	19.133.320.000
	<b>Terpenuhinya kebutuhan Sertifikasi Kompetensi ASN</b>				<b>456.356.000</b>
		Prosentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	100	456.356.000

### 3.4. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen Risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

**Tabel 3.2.**  
**Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis**  
**BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penang gung Jawab	Target Waktu Penyele saian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terpenuhinya Hak bangkom ASN	Prosentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya melalui Bangkom	Hasil Diklat belum berkontribusi bagi pelaksanaan tugas dalam organisasinya	Rendah	Pengiriman peserta tidak sesuai dengan standar/kebutuhan diklat	Kinerja ASN tidak optimal dan tidak meratanya hak pengembangan kompetensi	Memberikan rekomendasi kepada Kepala OPD Provinsi/Kab Kota atas hasil evaluasi pasca diklat dan penyempurnaan instrumen evaluasi pengembangan kompetensi yang terintegrasi	Kepala BPSDMD	Tahun 2024

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024**

Dalam rangka menyelaraskan program, kegiatan dan mempertajam indikator, (target kinerja program dan kegiatan) agar sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah untuk optimalisasi pencapaian sasaran dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan oleh BPSDMD, maka harus direncanakan program maupun kegiatan yang mendukungnya sebagai Lembaga Pengembangan Kompetensi ASN, guna mewujudkan Birokrasi berkelas dunia melalui SDM yang kompeten dan profesional. Pada Tahun 2024 telah direncanakan 1 (satu) program prioritas dengan 2 (dua) kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia :
  - a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.
  - b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi manajerial dan Fungsional.
2. Program dan kegiatan prioritas tersebut didukung oleh program dan kegiatan pendukung (ex-BAU) berupa 1 (satu) program dan 9 (sembilan) kegiatan.

Kesepakatan Forum PD untuk Penyempurnaan Dokumen Renja Tahun 2024 telah diakomodir dalam program, kegiatan, sub kegiatan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Spirit Nasionalisme menjadi roh dalam pengembangan kompetensi ASN.
2. Culture digital 5.0 harus dibangun kuat pada tiap ASN di Jawa Tengah tidak hanya sarana prasarana digitalnya saja.
3. Sistem Informasi pengembangan kompetensi pada BPSDMD perlu adanya penyesuaian antara target pembangunan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi.
4. Perlu ada sistem informasi untuk Kerjasama tidak hanya dengan lintas pemerintah daerah, harus didorong dengan pentahelix.
5. Penguatan Corporate University dalam integrasi perencanaan strategis Pemerintah Daerah dengan kebijakan pengembangan kompetensi (perlu penguatan pada sisi regulasi normatifnya).
6. Penguatan dan pengembangan metode non klasikal, antara lain magang, coaching dan mentoring dan varian yang lain.
7. Penguatan kolaborasi dengan Kab./Kota dalam implementasi pembelajaran non klasikal.

Adapun Penentuan Program Kegiatan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dituangkan di Tabel 4.1 :

**TABEL 4.1**  
**RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**  
**DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**

Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>										
		Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)					Angka	3,5	19.133.320.000	3,5	21.741.779.000
<b>5.04.02.1.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>										
		Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis					Dokumen	3	29.726.000	3	66.279.000
5.04.02.1.01.0002		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							4.844.000		6.279.000
		Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan					Dokumen	1	4.844.000	1	6.279.000
5.04.02.1.01.0004		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							24.882.000		60.000.000
		Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan					Dokumen	18	4.327.000	45	5.000.000
		Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi					Angka	15	20.555.000	40	55.000.000
<b>5.04.02.1.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>										
		Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi					Dokumen	3	297.775.000	3	405.000.000
5.04.02.1.02.0006		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional							59.550.000		135.000.000
		Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan					Dokumen	10	59.550.000	12	135.000.000
5.04.02.1.02.0008		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan							238.225.000		270.000.000
		Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan					Dokumen	13	41.631.000	17	40.000.000
		Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu					Dokumen	1	38.739.000	1	55.000.000
		Jumlah pelatihan yang diakreditasi					Jenis	1	95.307.000	1	90.000.000
		Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi					Angka	24	62.548.000	27	85.000.000
		Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional					%	100	1.350.000.000	100	2.000.000.000

Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		
								Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
5.04.02.1.02			<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>						<b>1.350.000.000</b>		<b>2.000.000.000</b>	
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Orang	1140	1.350.000.000	1278	2.000.000.000	
5.04.02.1.02.0007				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					1.350.000.000		2.000.000.000	
						Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	Orang	430	474.584.000	350	650.000.000	
						Jumlah peserta pelatihan penjurusan jabatan fungsional	Orang	390	503.159.000	200	650.000.000	
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	Orang	400	372.257.000	350	700.000.000	
		Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial						%	100	15.926.520.000	100	17.000.000.000
5.04.02.1.02			<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>						<b>15.926.520.000</b>		<b>17.000.000.000</b>	
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial	Orang	2310	15.926.520.000	1300	17.000.000.000	
5.04.02.1.02.0007				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					15.926.520.000		17.000.000.000	
						Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	Orang	60	199.700.000	400	2.000.000.000	
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Orang	200	2.530.248.000	240	4.000.000.000	
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	Orang	230	2.292.580.000	200	3.000.000.000	
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	Orang	120	2.104.945.000	120	3.000.000.000	
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	Orang	1745	8.799.047.000	1800	5.000.000.000	
		Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis						%	100	1.265.000.000	100	2.000.000.000
5.04.02.1.01			<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>						<b>1.265.000.000</b>		<b>2.000.000.000</b>	
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	Orang	2910	1.265.000.000	2910	2.000.000.000	
5.04.02.1.01.0003				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					1.265.000.000		2.000.000.000	
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	Orang	920	429.818.000	750	650.000.000	
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	Orang	850	423.000.000	750	700.000.000	

Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	Orang	1140	412.182.000	900	650.000.000
						Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%	85	264.299.000	85	270.500.000
<b>5.04.02.1.01</b>						<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>			<b>189.603.000</b>		<b>151.500.000</b>
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen	3	189.603.000	3	151.500.000
5.04.02.1.01.0001						Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			42.833.000		76.500.000
						Jumlah metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1	1.500.000	1	6.500.000
						Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan analisis pengembangan kompetensi	Dokumen	2	41.333.000	2	70.000.000
5.04.02.1.01.0002						Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			146.770.000		75.000.000
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	20	146.770.000	18	75.000.000
<b>5.04.02.1.02</b>						<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>			<b>74.696.000</b>		<b>119.000.000</b>
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi	Dokumen	3	74.696.000	3	119.000.000
5.04.02.1.02.0001						Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional			70.547.000		114.000.000
						Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1	1.500.000	1	7.000.000
						Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	Dokumen	2	20.049.000	2	32.000.000
						Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	24	48.998.000	24	75.000.000
5.04.02.1.02.0006						Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional			4.149.000		5.000.000
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	4.149.000	1	5.000.000
<b>5.04.02</b>						<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			<b>456.356.000</b>		<b>533.500.000</b>
						Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	%	100	456.356.000	100	533.500.000
<b>5.04.02.1.02</b>						<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>			<b>456.356.000</b>		<b>533.500.000</b>
						Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi	Dokumen	2	456.356.000	2	533.500.000

Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		
								Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
5.04.02.1.02.0002						Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi			37.655.000		95.000.000	
						Jumlah identifikasi kebutuhan skema sertifikasi	Dokumen	1	15.570.000	1	55.000.000	
						Jumlah kualifikasi asessor kompetensi yang dimiliki	Orang	2	22.085.000	2	40.000.000	
5.04.02.1.02.0003						Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			418.701.000		438.500.000	
						Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	Orang	300	418.701.000	350	438.500.000	
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>								<b>46.908.724.000</b>		<b>52.305.000.000</b>	
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah						%	100	46.908.724.000	100	52.305.000.000
<b>X.XX.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>32.253.755.000</b>		<b>31.178.000.000</b>	
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	32.253.755.000	6	31.178.000.000	
X.XX.01.1.02.0001						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			29.235.266.000		26.000.000.000	
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	29.235.266.000	12	26.000.000.000	
X.XX.01.1.02.0002						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2.798.479.000		4.805.000.000	
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	2.798.479.000	1	4.805.000.000	
X.XX.01.1.02.0003						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			56.863.000		76.000.000	
						Jumlah Dokumen pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	1	56.863.000	1	76.000.000	
X.XX.01.1.02.0005						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			78.868.000		78.000.000	
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat desa	Laporan	1	78.868.000	1	78.000.000	
X.XX.01.1.02.0007						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			53.194.000		138.000.000	
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah yang disusun	Laporan	1	53.194.000	1	138.000.000	
X.XX.01.1.02.0008						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			31.085.000		81.000.000	
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	1	31.085.000	1	81.000.000	

Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>X.XX.01.1.03</b>			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>234.000.000</b>		<b>240.000.000</b>
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	234.000.000	1	240.000.000
X.XX.01.1.03.0002					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				234.000.000		240.000.000
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	234.000.000	2	240.000.000
<b>X.XX.01.1.04</b>			<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>						<b>79.990.000</b>		<b>129.000.000</b>
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	79.990.000	1	129.000.000
X.XX.01.1.04.0007					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				79.990.000		129.000.000
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Laporan	1	79.990.000	1	129.000.000
<b>X.XX.01.1.05</b>			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>230.400.000</b>		<b>470.000.000</b>
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	230.400.000	100	470.000.000
X.XX.01.1.05.0002					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-		-
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	1	-	1	-
X.XX.01.1.05.0003					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				49.000.000		70.000.000
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	10	49.000.000	10	70.000.000
X.XX.01.1.05.0009					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				181.400.000		400.000.000
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	181.400.000	35	400.000.000
<b>X.XX.01.1.06</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>1.996.289.000</b>		<b>2.777.000.000</b>
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.996.289.000	100	2.777.000.000
X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				173.093.000		360.000.000
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	173.093.000	1	360.000.000
X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				188.196.000		500.000.000
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	188.196.000	1	500.000.000
X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				374.165.000		400.000.000

Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		
								Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	374.165.000	1	400.000.000	
X.XX.01.1.06.0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				305.060.000		300.000.000	
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	305.060.000	1	300.000.000	
X.XX.01.1.06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				76.200.000		100.000.000	
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	76.200.000	1	100.000.000	
X.XX.01.1.06.0006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				36.000.000		42.000.000	
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bulan	12	36.000.000	12	42.000.000	
X.XX.01.1.06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		100.000.000	
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	
X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				275.070.000		350.000.000	
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Bulan	12	275.070.000	12	350.000.000	
X.XX.01.1.06.0010					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.505.000		25.000.000	
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Bulan	12	8.505.000	12	25.000.000	
X.XX.01.1.06.0011					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				460.000.000		600.000.000	
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	6	460.000.000	6	600.000.000	
<b>X.XX.01.1.07</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>723.000.000</b>		<b>3.325.000.000</b>
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Dokumen	1	723.000.000	1	3.325.000.000	
X.XX.01.1.07.0006					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				588.000.000		1.890.000.000	
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	66	588.000.000	58	1.890.000.000	
X.XX.01.1.07.0007					Pengadaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000		35.000.000	
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	15.000.000	1	35.000.000	
X.XX.01.1.07.0010					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				120.000.000		1.400.000.000	
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	31	120.000.000	37	1.400.000.000	

Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>X.XX.01.1.08</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>9.647.440.000</b>		<b>11.065.000.000</b>
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	9.647.440.000	1	11.065.000.000
X.XX.01.1.08.0001						Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.800.000		10.000.000
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	4.800.000	12	10.000.000
X.XX.01.1.08.0002						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.428.890.000		3.055.000.000
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bulan	12	2.428.890.000	12	3.055.000.000
X.XX.01.1.08.0004						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7.213.750.000		8.000.000.000
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bulan	12	7.213.750.000	12	8.000.000.000
<b>X.XX.01.1.09</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>1.743.850.000</b>		<b>3.121.000.000</b>
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Dokumen	1	1.743.850.000	1	3.121.000.000
X.XX.01.1.09.0002						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			149.600.000		200.000.000
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Bulan	12	149.600.000	12	200.000.000
X.XX.01.1.09.0007						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			30.000.000		36.000.000
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Bulan	12	30.000.000	12	36.000.000
X.XX.01.1.09.0009						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.000.000.000		2.000.000.000
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bulan	12	1.000.000.000	12	2.000.000.000
X.XX.01.1.09.0010						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			564.250.000		885.000.000
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bulan	12	564.250.000	12	885.000.000
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>								<b>325.000.000</b>		<b>500.000.000</b>
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	325.000.000	100	500.000.000
<b>X.XX.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								<b>325.000.000</b>		<b>500.000.000</b>
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	325.000.000	100	500.000.000
X.XX.01.1.01.0001						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			135.000.000		190.000.000

Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	135.000.000	10	190.000.000
X.XX.01.1.01.0007					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				190.000.000		310.000.000
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	21	190.000.000	21	310.000.000

#### **4.2. Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2024.**

Guna menciptakan rencana penyelenggaraan kegiatan yang baik dan *good governance*, maka diperlukan suatu Sistem Pengendalian dalam mengelola keuangan negara / daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian tersebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Tindak Pengendalian atas identifikasi dan analisis risiko serta penetapan prioritas risiko sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2024 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas pencapaian tujuan organisasi, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung pengendalian yang memadai.

Adapun Penentuan Program Kegiatan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dituangkan di Tabel 4.2

Tabel 4.2 :  
Rencana Tindak Pengendalian terhadap Risiko Program / Kegiatan  
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

PROGRAM /KEGIATAN PD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERNYATAAN RESIKO	SKALA RESIKO	SEBAB	DAMPAK	RTP	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU SELESAI
<b>Program :</b> Program Pengembangan Sumber Daya Manusia  <b>Kegiatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kompetensi Teknis</li> <li>• Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</li> </ul>	Persentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase kelulusan peserta tidak mencapai 100%	Sangat Rendah	Peserta mengundurkan diri dikarenakan sakit, penugasan lain dan alasan lainnya	Persentase kelulusan peserta tidak mencapai target 100%	Memberikan himbauan kepada instansi pengirim agar peserta yang ditugaskan mengikuti pelatihan dapat dibebaskan sementara waktu atau diberikan tugas dengan porsi yang memperhatikan keikutsertaan ybs dalam pelatihan. Menghimbau kepada peserta agar selalu menginfokan apabila peserta berhalangan mengikuti pelatihan sehingga dapat dicarikan solusinya.	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	2 bulan
	Persentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Perubahan Jenis Pelatihan Fungsional	Sangat Rendah	Terbitnya regulasi baru terkait jabatan fungsional (Permenpan RB no. 1 tahun 2023)	Terkendalanya pelaksanaan pelatihan karena penyesuaian jenis pelatihan terbaru, jadwal, anggaran, sarpras dan SDM	Mengadakan rakor dan sosialisasi terkait regulasi terbaru.	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	3 Bulan
	Persentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Manajerial	Perubahan metode dan desain pembelajaran pelatihan	Sedang	Adanya perubahan regulasi dari Instansi Pembina (LAN)	Adanya penyesuaian jadwal, anggaran, sarpras dan SDM	Mengadakan rakor dan sosialisasi terkait regulasi terbaru	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	1 Semester
	Persentase perencanaan Pengembangan kompetensi yang Ditindaklanjuti Dokumen Perencanaan	Usulan Pelatihan yang diusulkan ASN tidak semuanya Terakomodir dalam perencanaan pengembangan kompetensi di BPSDMD maupun di Masing masing OPD	Rendah	Belum mempunyai Rencana Pengembangan Kompetensi di Masing-Masing Instansi	Hak Kompetensi 20 JP belum menyeluruh ke Semua ASN	Untuk memenuhi hak 20 JP, telah menyusun Metode Pelatihan MOOC, yang dapat menjangkau banyak ASN di Provinsi Jawa Tengah	ASN Kab/Kota dan Provinsi Jateng	1 Tahun
	Indeks penjaminan mutu	Tingkat ketercapaian mutu penyelenggaraan	Rendah	Ketidaksesuaian antara nama pengajar	Pada saat dilakukan evaluasi	Kontrol penugasan sesuai jadwal yang telah	Bidang Sertifikasi	1 Semester

PROGRAM /KEGIATAN PD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERNYATAAN RESIKO	SKALA RESIKO	SEBAB	DAMPAK	RTP	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU SELESAI
	pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	pelatihan dibawah capaian mutu		yang ditugaskan dengan yang ada di jadwal dan seringnya pengajar yang ditugaskan secara mendadak sehingga mengalami pergantian pengajar secara mendadak	penyelenggaraan dan tenaga pengajar mendapat skore/nilai dibawah dari yang ditargetkan yakni dibawah 3,5 dari skala 4	diinput dalam aplikasi PAK WI dengan SPT dari Manajemen	Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
	Persentase Skema Sertifikasi Kompetensi Yang Dilaksanakan	Target peserta minimal dalam suatu skema sertifikasi tidak terpenuhi sehingga kegiatan ditunda/tidak dapat dilaksanakan	Sedang	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi atau portofolio	-Persyaratan dan atau kenaikan jenjang peserta sertifikasi tertunda / tidak tepat waktu -Realisasi target skema kompetensi yang dilaksanakan tidak tercapai	- Pendampingan calon peserta dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan portofolio - Penajaman identifikasi kebutuhan calon peserta uji kompetensi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	1 Semester

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berlandaskan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Proses penyusunan RKPD Tahun 2024 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005 - 2025. Kondisi Lingkungan Strategis (Lingstra) mendorong terciptanya birokrasi yang semakin dinamis untuk mendukung pembangunan Indonesia (dengan memegang teguh nilai BerAKHLAK dalam melaksanakan tugasnya) yang berimbas pada penyesuaian arah kebijakan, strategi, prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Oleh karena itu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk melakukan perubahan pola penyelenggaraan pengembangan kompetensi dari pola klasikal menjadi pola *blended learning* yang berpengaruh pada penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam percepatan perwujudan Smart ASN tahun 2024, hal ini didukung juga dengan Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi melalui Sertifikasi Kompetensi yang berperan sebagai penguatan Pengembangan Kompetensi bagi ASN yang mengikuti pelatihan.

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mendorong terciptanya birokrasi yang semakin dinamis untuk mendukung pembangunan Indonesia mengingat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, dimana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai *problem solving* bagi permasalahan pembangunan SDM ASN di Jawa Tengah melibatkan beberapa *stakeholder* / pentahelik dalam *Community of Practice*.

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Pengembangan Kompetensi ASN berperan mewujudkan Birokrasi berkelas dunia melalui SDM yang kompeten dan profesional memberikan pelayanan *excellent* kepada masyarakat melalui Pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan SDM Organisasi, melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan penjaminan mutu pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi melalui Jateng Corporate University menuju Jateng Pinter Bareng, penguatan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Sarana Prasarana pelatihan berbasis digital untuk mewujudkan *Techno Training Center* serta memberikan fasilitasi kepada *stakeholders* terkait untuk mewujudkan reformasi birokrasi berkelas dunia.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Pembina Utama Muda

NIP. 19721206 199412 1 001

**LAMPIRAN**  
**Manajemen Risiko Perangkat Daerah**

**a. Identifikasi Risiko**

Tabel 1  
Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	Persentase kelulusan peserta tidak mencapai 100%	Risiko Operasional	Peserta mengundurkan diri dikarenakan sakit, penugasan lain dan alasan lainnya	Persentase kelulusan peserta tidak mencapai target 100%	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan instansi pengirim peserta
2	Sasaran Program	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	Perubahan jenis pelatihan fungsional	Risiko Operasional	Terbitnya regulasi baru terkait jabatan fungsional (Permenpan RB no. 1 tahun 2023)	Terkendalanya pelaksanaan pelatihan karena penyesuaian jenis pelatihan terbaru, jadwal, anggaran, sarpras dan SDM	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
3	Sasaran Program	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial	Perubahan metode dan desain pembelajaran pelatihan	Risiko Operasional	Adanya perubahan regulasi dari Instansi Pembina (LAN)	Adanya penyesuaian jadwal, anggaran, sarpras dan SDM	BPSDMD Prov Jateng
4	Sasaran Program	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	Usulan Pelatihan yang diusulkan ASN tidak semuanya Terakomodir dalam perencanaan pengembangan kompetensi di BPSDMD maupun di Masing masing OPD	Risiko Operasional	belum mempunyainya Rencana Pengembangan Kompetensi di Masing-Masing Instansi	Hak Kompetensi 20 JP belum menyeluruh ke Semua ASN	Kab/Kota dan Provinsi Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Program	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	Tingkat ketercapaian mutu penyelenggaraan pelatihan dibawah capaian mutu	Risiko Operasional	ketidaksiesuaian antara nama pengajar yang ditugaskan dengan yang ada di jadwal dan seringnya pengajar yang ditugaskan secara mendadak sehingga mengalami pergantian pengajar secara mendadak	pada saat dilakukan evaluasi penyelenggaraan dan tenaga pengajar mendapat skore/nilai dibawah dari yang ditargetkan yakni dibawah 3,5 dari skala 4	BPSDMD Prov jateng, mitra kab/kota dan peserta pelatihan
6	Sasaran Program	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	Target peserta minimal dalam suatu skema sertifikasi tidak terpenuhi sehingga kegiatan ditunda/tidak dapat dilaksanakan	Risiko Operasional	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi atau portofolio	- Persyaratan dan atau kenaikan jenjang peserta sertifikasi tertunda / tidak tepat waktu - Realisasi target skema kompetensi yang dilaksanakan tidak tercapai	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu dan Calon peserta sertifikasi

## b. Analisis Risiko

Tabel 2  
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Persentase kelulusan peserta tidak mencapai 100%	1	2	Sangat Rendah	Ada	Memberikan himbauan kepada instansi pengirim agar peserta yang ditugaskan mengikuti pelatihan dapat dibebaskan tugas sementara waktu atau diberikan tugas dengan porsi yang memperhatikan keikutsertaan ybs dalam pelatihan. Menghimbau kepada peserta agar selalu menginfokan apabila peserta berhalangan mengikuti pelatihan sehingga dapat dicarikan solusinya.	Memadai	1	1	Sangat Rendah
Perubahan jenis pelatihan fungsional	1	2	Sangat Rendah	Ada	mengadakan rakor dan sosialisasi terkait regulasi terbaru	Memadai	1	1	Sangat Rendah
Perubahan metode dan desain pembelajaran pelatihan	2	3	Sedang	Ada	mengadakan rakor dan sosialisasi terkait regulasi terbaru	Memadai	1	2	Sangat Rendah
Usulan Pelatihan yang diusulkan ASN tidak semuanya Terakomodir dalam perencanaan pengembangan kompetensi di BPSDMD maupun di Masing masing OPD	2	2	Rendah	Ada	Untuk memenuhi hak 20 JP, telah menyusun Metode Pelatihan MOOC, yang dapat menjangkau banyak ASN di Provinsi Jawa Tengah	Memadai	2	2	Rendah

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tingkat ketercapaian mutu penyelenggaraan pelatihan dibawah capaian mutu	2	2	Rendah	Ada	Kontrol penugasan sesuai jadwal yang telah diinput dalam aplikasi PAK WI dengan SPT dari Manajemen	Memadai	2	2	Rendah
Target peserta minimal dalam suatu skema sertifikasi tidak terpenuhi sehingga kegiatan ditunda/tidak dapat dilaksanakan	2	3	Sedang	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan calon peserta dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan portofolio</li> <li>- Penajaman identifikasi kebutuhan calon peserta uji kompetensi</li> </ul>	Memadai	1	2	Sangat Rendah

### c. Penetapan Risiko Prioritas

Tabel 3  
Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Presentase akutanbilitas administrasi keuangan yang masih perlu ditingkatkan	Sedang	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Pengelolaan administrasi penata usahaan keuangan belum tertib	Data yang tersaji dalam laporan keuangan diragukan ke akutanbilitasnya dan transparansi

### d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Tabel 4  
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Program :</b> Program Pengembangan Sumber Daya Manusia  <b>Kegiatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kompetensi Teknis</li> <li>• Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi</li> </ul>	<b>Program :</b> Persentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase kelulusan peserta tidak mencapai 100%	Sangat Rendah	Peserta mengundurkan diri dikarenakan sakit, penugasan lain dan alasan lainnya	Persentase kelulusan peserta tidak mencapai target 100%	Memberikan himbauan kepada instansi pengirim agar peserta yang ditugaskan mengikuti pelatihan dapat dibebaskan sementara tugas dengan porsi yang memperhatikan keikutsertaan ybs dalam pelatihan. Menghimbau kepada peserta agar selalu menginfokan apabila peserta berhalangan mengikuti	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	2 bulan

Tujuan/Sasaran/P rogram/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/P rogram/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesa ian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Manajerial dan Fungsional						pelatihan sehingga dapat dicarikan solusinya.		
	Persentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Perubahan Jenis Pelatihan Fungsional	Sangat Rendah	Terbitnya regulasi baru terkait jabatan fungsional (Permenpan RB no. 1 tahun 2023)	Terkendalanya pelaksanaan pelatihan karena penyesuaian jenis pelatihan terbaru, jadwal, anggaran, sarpras dan SDM	Mengadakan rakor dan sosialisasi terkait regulasi terbaru.	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	3 Bulan
	Persentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Manajerial	Perubahan metode dan desain pembelajaran pelatihan	Sedang	Adanya perubahan regulasi dari Instansi Pembina (LAN)	Adanya penyesuaian jadwal, anggaran, sarpras dan SDM	Mengadakan rakor dan sosialisasi terkait regulasi terbaru	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	1 Semester
	Persentase perencanaan Pengembangan kompetensi yang Ditindaklanjuti Dokumen Perencanaan	Usulan Pelatihan yang diusulkan ASN tidak semuanya Terakomodir dalam perencanaan pengembangan kompetensi di BPSDMD maupun di Masing masing OPD	Rendah	Belum mempunyainya Rencana Pengembangan Kompetensi di Masing-Masing Instansi	Hak Kompetensi 20 JP belum menyeluruh ke Semua ASN	Untuk memenuhi hak 20 JP, telah menyusun Metode Pelatihan MOOC, yang dapat menjangkau banyak ASN di Provinsi Jawa Tengah	ASN Kab/Kota dan Provinsi Jateng	1 Tahun
	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	Tingkat ketercapaian mutu penyelenggaraan pelatihan dibawah capaian mutu	Rendah	Ketidaksesuaian antara nama pengajar yang ditugaskan dengan yang ada di jadwal dan seringnya pengajar yang ditugaskan secara mendadak sehingga mengalami pergantian	Pada saat dilakukan evaluasi penyelenggaraan dan tenaga pengajar mendapat skore/nilai dibawah dari yang ditargetkan yakni dibawah 3,5 dari skala 4	Kontrol penugasan sesuai jadwal yang telah diinput dalam aplikasi PAK WI dengan SPT dari Manajemen	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	1 Semester

Tujuan/Sasaran/P rogram/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/P rogram/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesa ian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				pengajar secara mendadak				
	Persentase Skema Sertifikasi Kompetensi Yang Dilaksanakan	Target peserta minimal dalam suatu skema sertifikasi tidak terpenuhi sehingga kegiatan ditunda/tidak dapat dilaksanakan	Sedang	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi atau portofolio	-Persyaratan dan atau kenaikan jenjang peserta sertifikasi tertunda / tidak tepat waktu -Realisasi target skema kompetensi yang dilaksanakan tidak tercapai	- Pendampingan calon peserta dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan portofolio - Penajaman identifikasi kebutuhan calon peserta uji kompetensi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	1 Semester